



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 803/V/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, untuk kelancaran program kerja Tim Koordinasi maka Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 748/V/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2019-2024, perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

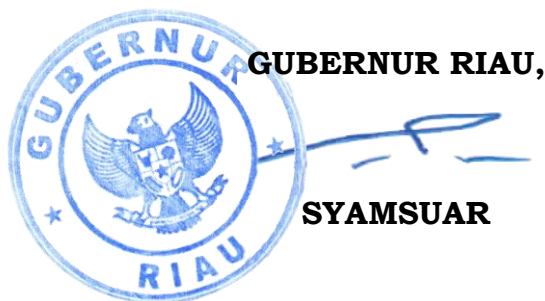
Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau; dan
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- KETIGA : Rincian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 784/V/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 Mei 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
5. Inspektur Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru.
6. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 803/V/2020

TANGGAL : 5 Mei 2020

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI RIAU**

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Wakil Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Riau	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
10.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
11.	Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
14.	Kepala Dinas Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
15.	Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
17.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Wakil Sekretaris

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
18.	Inspektur Daerah Provinsi Riau	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
19.	Kepala Biro Perekonomian	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
20.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
21.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil Sekretaris
SEKRETARIAT			
22.	Sekretaris	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Kepala Sekretariat
23.	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Wakil
24.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
25.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau	Anggota
26.	Sekretaris	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
27.	Sekretaris	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
28.	Sekretaris	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Anggota
29.	Sekretaris	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
30.	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Anggota
31.	Sekretaris	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
32.	Sekretaris	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Anggota
33.	Sekretaris	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Anggota
34.	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Anggota
35.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
36.	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Budaya, dan Pemuda	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
37.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
38.	Ir. Ria Ettika, M.Si	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
39.	M. Khofifuddin, SH	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK KERJA PENDATAAN DAN INFORMASI			
40.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Ketua Pokja
41.	Kepala Bidang Statistik Sosial	BPS Provinsi Riau	Wakil
42.	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Anggota
43.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
44.	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
45.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan Daerah	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
46.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
47.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
48.	Rinaldi SE., M. Kes	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
49.	Aprilia Sundari, S.Si	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
50.	Irvan Tri Harnanda S.STP	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
51.	Rudi Hendra Gunawan, S.Kom, M.Si.	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
52.	Raji Rahmat Hidayat S,Sos	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KEMITRAAN			
53.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Ketua Pokja


NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
54.	Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Wakil
55.	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
56.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri dan Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Anggota
57.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
58.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
59.	Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan dan Pembangunan Manusia	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
60.	Ketua Forum CSR Kesos	Forum CSR Kesos Provinsi Riau	Anggota
61.	Kepala Bulog Divisi Regional Riau-Kepulauan Riau	Perum Bulog Divisi Regional Riau-Kepulauan Riau	Anggota
62.	Nettiastuti, SP	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
63.	Said Muhammad Arief, SE	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT			
64.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Ketua Pokja
65.	Sekretaris	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Wakil
66.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
67.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau	Anggota
68.	Koordinator SLRT Provinsi Riau	Sekretariat SLRT Provinsi Riau	Anggota
69.	Desniriza SH., M.Si.	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
70.	Agus Krisna, SH.	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA			
71.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua Pokgram
72.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial Provinsi Riau	Wakil
73.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
74.	Sekretaris	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
75.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
76.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
77.	Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau	Anggota
78.	Ketua Forum Zakat (FOZ)	Forum Zakat (FOZ) Provinsi Riau	Anggota
79.	Neil Yulia, SE, M.Si	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
80.	Sri Lestari S.Sos	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK PROGRAM BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
81.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	Ketua Pokgram
82.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Wakil
83.	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
84.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau	Anggota
85.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Anggota
86.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
87.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
88.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Anggota
89.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau	Anggota
90.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
91.	Kepala Bidang Holtikultura	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
92.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
93.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau	Anggota
94.	Kepala Bidang Produksi Perternakan	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Anggota
95.	Kepala Bidang Agribisnis Perternakan	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	Anggota
96.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
97.	Kepala Bidang Produksi Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Anggota
98.	Kepala Bidang Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau	Anggota
99.	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
100.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
101.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
102.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
103.	Ketua LPPM Universitas Riau	Universitas Riau	Anggota
104.	Ketua LPPM Universitas Islam Riau	Universitas Islam Riau	Anggota
105.	Ketua LPPM Universitas Lancang Kuning	Universitas Lancang Kuning	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
106.	Ir. Tien Mastina, M.Si	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
107.	Indah oktaviani	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO DAN KECIL			
108.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua Pokgram
109.	Sekretaris	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Wakil
110.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Anggota
111.	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau	Anggota
112.	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
113.	Kepala Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Anggota
114.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
115.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
116.	Ketua Forum BUMDes Provinsi Riau	Forum BUMDes Provinsi Riau	Anggota
117.	DR. Azharuddin M Amin, SP, M.Sc	Universitas Islam Riau	Anggota
118.	Raisa Wisudawati S.I.P. M.Si.	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Anggota
KELOMPOK PROGRAM LAINNYA			
119.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Ketua Pokgram
120.	Sekretaris	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Riau	Wakil
121.	Technical Officer of SDG's	Perwakilan UNDP - Riau	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
122.	Koordinator Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) Provinsi Riau	Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) Provinsi Riau	Anggota
123.	DR. Sri Endang Kornita, SE, M.Si	Universitas Riau	Anggota
124.	Tuti Rahmawati SP., M.KM	BAPPEDALITBANG Provinsi Riau	Amggota


GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 803/V/2020

TANGGAL : 5 Mei 2020

**RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI RIAU**

1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab terhadap tugas yang dilaksanakan oleh TKPK Provinsi Riau; dan
 - b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan TKPK Provinsi Riau.

2. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. Bertugas mengkoordinir dan memimpin TKPK Provinsi Riau; dan
 - b. Bertanggung jawab terhadap dokumen pelaksanaan TKPK Provinsi Riau.

3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan kegiatan dan program TKPK Provinsi Riau dengan sekretariat, kelompok kerja dan kelompok program;
 - b. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kegiatan dan program TKPK Provinsi Riau dari sekretariat, kelompok kerja dan kelompok program;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kegiatan dan Program TKPK Provinsi Riau di sekretariat, kelompok kerja dan kelompok program;
 - d. Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan program TKPK Provinsi Riau dari sekretariat, kelompok kerja dan kelompok program kepada ketua TKPK Provinsi Riau; dan
 - e. Menyiapkan dukungan lainnya dalam pelaksanaan TKPK Provinsi Riau.

4. Sekretariat TKPK Provinsi Riau mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Provinsi Riau dan berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.
 - a. Memfasilitasi koordinasi dengan kelompok kerja dan kelompok program terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan dan program yang ada;
 - b. Memfasilitasi rapat evaluasi pembahasan pelaksanaan kinerja disetiap kelompok kerja dan kelompok program;
 - c. Melakukan koordinasi dengan TKPK di Kabupaten/Kota;
 - d. Menyelenggarakan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan TKPK;
 - e. Mengarsipkan setiap administrasi pelaksanaan kegiatan TKPK;
 - f. Memfasilitasi penyusunan kebijakan dasar hukum tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - g. Memfasilitasi penyusunan program dan strategi pelaksanaan kegiatan TKPK bersama dengan kelompok kerja dan kelompok program;
 - h. Memfasilitasi penyusunan dokumen strategi dan laporan tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; dan
 - i. Memfasilitasi penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan program TKPK dari kelompok kerja dan kelompok program kepada Ketua TKPK.



5. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam

mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. Pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan;
 - d. Penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
 - e. Melakukan analisa data dan informasi tentang kemiskinan; dan
 - f. Membuat laporan tentang verifikasi dan validasi data penanggulangan kemiskin.
6. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah;
 - c. Penyusunan Kebijakan dengan Mitra dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah terkait program penaggulangan dan perlindungan sosial;dan
 - d. Membuat laporan tentang hasil pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
7. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. Perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Membentuk SRLT Provinsi Riau;
 - e. Melakukan koordinasi, evaluasi dan pemantauan terhadap SRLT Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Membuat survey kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - g. Menbuat laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan.
8. Kelompok Program Bantuan Sosial terpadu berbasis keluarga melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan social terpadu berbasis keluarga meliputi :
- a. Pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat

- daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah;
 - d. Pengelolaan data pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah; dan
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga masyarakat yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah.
9. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi :
- a. Pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah;
 - c. Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah;
 - d. Pengelolaan data pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah; dan
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kotadan lembaga non pemerintah.
10. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil meliputi :
- a. Pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;

- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
 - d. Pengelolaan data pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah; dan
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah.
11. Kelompok Program Lainnya melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Riau dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya, yakni meliputi :
- a. Pendataan dan pemetaan terhadap pelaksanaan program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
 - b. Pemantauan terhadap pelaksanaan program Lainnya yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
 - c. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Lainnya yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah;
 - d. Pengelolaan data pelaksanaan program Lainnya yang dikelola pemerintah pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah; dan
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan program Lainnya yang dikelola pusat, daerah (organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang terkait), Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah.

**GUBERNUR RIAU,**

SYAMSUAR